

“FATHERING JAPAN”: DISKURSUS ALTERNATIF DALAM HEGEMONI KETIDAKSETARAAN GENDER DI JEPANG¹

“FATHERING JAPAN” AS AN ALTERNATIVE DISCOURSE FROM THE HEGEMONY OF GENDER GAP IN JAPAN

Yusy Widarahesty

Universitas Al Azhar

Email:yusy_widarahesty@uai.ac.id

Diterima: 07-4-2018

Direvisi: 03-5-2018

Disetujui: 31-5-2018

ABSTRACT

The phenomenon of gender gap in Japan has brought many impacts of change in Japan from the declining birth rate and including the emergence of non-profit organizations (NPO) action groups namely “Fathering Japan” (Ikumen) founded by Tatsuya Ando in 2006, which tried to present as a form of resistance ideology from the myth of “Gender Stereotypes” hegemony in Japan. Ando established the NPO to encourage present and future fathers to play a more active role in child-rearing. “The priority of traditional Japanese fathers is work ... they don’t know what to do even when they come home early,” said Tetsuya Ando. Thus, it is important to study this social and cultural phenomenon to understand the whole structure of Japanese non-traditional security problem that can be seen through the “Fathering Japan” as a new discourse. By using the discourse alternative approach to analyze the role of the social movement of “Fathering Japan” (Ikumen) as the resistance ideology from Japan cultural mythology, the study was conducted by using qualitative methods through the Discourse Analysis by Ernesto and Chantal Mouffe.

Keywords: *fathering Japan, discourse, Non Profit Organization, gender gap, Japan*

ABSTRAK

Fenomena kesenjangan gender di Jepang telah membawa banyak dampak perubahan di Jepang dari tingkat kelahiran yang menurun dan termasuk munculnya Organisasi Non Profit (NPO) yaitu “Fathering Japan” (Ikumen) yang didirikan oleh Tatsuya Ando pada 2006, yang mencoba menyajikan bentuk ideologi perlawanan dari mitos hegemoni “Gender Stereotypes” di Jepang. Ando mendirikan NPO untuk mendorong ayah hadir di masa depan untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam membesarkan anak. “Prioritas ayah tradisional Jepang adalah pekerjaan ... mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan bahkan ketika mereka pulang lebih awal,” kata Tetsuya Ando. Dengan demikian, penting untuk mempelajari fenomena sosial dan budaya ini untuk memahami keseluruhan struktur masalah keamanan non-tradisional Jepang yang dapat dilihat melalui “Fathering Japan” sebagai diskursus baru. Dengan menggunakan pendekatan diskursus alternatif untuk menganalisis peran gerakan sosial “Fathering Japan” (Ikumen) sebagai ideologi perlawanan dari mitologi budaya Jepang, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui Analisis Wacana oleh Ernesto dan Chantal Mouffe.

Kata kunci: *fathering Japan, diskursus, NPO, ketimpangan gender, Jepang*

¹ Sebagian isi dari tulisan ini sudah pernah dipublikasikan sebelumnya dalam jurnal berjudul : “Fenomena Penurunan Angka Kelahiran di Jepang’ dan Reproduksi kultural perempuan ideal Jepang melau film Oshin karya Shin Togashi 2013.

LATAR BELAKANG

*“My father is a salaryman?
Who spend his life in crowded trains
with his head bowed down, and
his toes trampled on
oh! How busy he is!
At the weekend he does as he pleases..
My daddy is 1 in Japan (Soundtrack
lagu kartun Osomatsu kun)*

“*A society without fathers*”, begitulah ekspresi dari ungkapan seorang Takeo Doi seorang ahli budaya Jepang yang mengatakan bahwa karakter utama yang tercermin dari masyarakat modern adalah “*fatherless society*”. (Mour & Hirosuke, 2004).

Sejarah modernisasi Jepang dimulai pada masa Meiji yang dikenal melalui slogannya “kejar dan lampau Barat”. Pada masa inilah transformasi Jepang dari negara agraris perlahan berubah menjadi industrialis. Periode ini juga dikenal sebagai arus masuknya globalisasi gelombang ke 2 di Jepang, yaitu gelombang arus segala hal yang berkaitan dengan Barat masuk ke Jepang.

Ketika globalisasi kedua melanda Jepang lahirlah slogan pemerintah Jepang, “*Datsuo Nuo (live Asia go To West!)*” yang mencoba belajar dari Barat dan menerapkan berbagai

² *Salaryman* begitulah sebutan untuk para laki-laki (ayah) kebanyakan di Jepang. *Salaryman* yang secara harafiah berasal dari kata *salary* yaitu *salary* (gaji) dan *man* yaitu orang yang berarti ‘orang gajian’ merupakan profesi yang mendominasi laki-laki (ayah) di Jepang pada masa modern. Laki-laki di Jepang dari generasi Edo, Meiji sampai Hesei (sekarang) merupakan kelompok yang memang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan negara. Upaya pengejaran Jepang dari Barat sampai perolehan Jepang pada posisi negara maju yang paling diperhitungkan di Asia Timur, tentunya tidak terlepas dari peranan para *salaryman* ini. “Pahlawan Kerah Putih” (Mouer & Hirosuke, 2005., 71), begitu julukannya untuk para *salaryman*, dikenal memiliki totalitas dalam kualitas etos kerja yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari semenjak pasca Perang Dunia II, di mana Jepang termasuk diantara banyak negara maju yang memiliki jam kerja paling panjang. Berikut adalah tabel perbandingan lama kerja dalam seminggu antara Jepang dan negara maju lainnya dari tahun 1950-an sampai awal 2000-an.

nilai Barat pada seluruh aspek kehidupan di Jepang. Komitmen pemerintah untuk menyetarakan negaranya dengan Barat ini kemudian dianggap telah berhasil membawa Jepang menjadi salah satu pemain penting dalam laju perekonomian dunia. Di sisi lain komitmen tersebut meninggalkan banyak persoalan, salah satunya yaitu tereliminasi para laki-laki (ayah) di Jepang di dalam keluarganya sendiri.

Tabel. 1.1 *International comparison of weekly hours of work for production worker in manufacturing*

Year	Japan	USA	UK	France	Germany
1956	47.5	40.4	48.2	45.6	47.8
1960	48.1	39.7	47.4	45.7	45.6
1965	44.3	41.2	46.1	45.6	44.1
1970	43.3	39.8	44.9	44.8	43.8
1975	38.8	39.5	42.7	41.7	40.4
		38.6			
1980	42.2	39.7	41.9	40.7	41.6
		42.3	40.6		
1985	46.2	40.5	43.7	38.6	40.7
1990	45.7	40.8	44.3	38.7	39.5
1995	43.5	41.6	42.2	38.7	38.3
1999	42.7	41.7	41.4	n.a	n.a

Sumber: Ross Mouer dan Kawanishi Hirosuke, 2005, 71

Dengan angka jam kerja tersebut dapat dikatakan bahwa *salaryman* atau “pahlawan kerah putih” tidak memiliki waktu luang selain mengabdikan pada perusahaan tempat para *salaryman* tersebut bekerja. Fenomena tersebut tentunya meninggalkan berbagai persoalan, selain ditenggarai sebagai salah satu penyebab menurunnya angka kelahiran di Jepang, karena dianggap terlalu sibuk bekerja, tetapi juga para laki-laki ini kemudian mendapat *stereotype* sebagai “robot-robot” yang kaku dan berhati dingin terhadap keluarga. (Maruko, 2018)

Sebagai “mesin” penggerak ekonomi Jepang, laki-laki (ayah) di Jepang tumbuh dalam budaya yang tidak memiliki sensitivitas terhadap urusan domestik dan anak. Terinternalisasikannya nilai-nilai patriarki yang dikonstruksi oleh pemerintah Jepang dari zaman Edo ini menyebabkan munculnya resistensi dari kelompok feminis Jepang yang menuntut kesetaraan gender di Jepang. Gerakan ini muncul

pada masa restorasi Meiji yang merupakan gelombang pertama Feminisme Jepang, namun dampak dari internalisasi pada masa Edo tidak dapat dihapuskan secara utuh dari masyarakat. Konstitusi Meiji yang disahkan pada 1889 membuat sistem *Ie* (yaitu sistem keluarga tradisional Jepang yang menempatkan laki-laki sebagai pusat hirarki tertinggi dalam segala hal) dihapuskan dari kebijakan pemerintah Jepang. Namun '*Meiji Civil Code*' masih membantah hak-hak perempuan. (Koyama, 2018, 11)

Untuk itu perhatian pemerintah Jepang pun sangat besar pada hal-hal yang menyangkut kewajiban dan hak kaum perempuan pada saat itu. Di antaranya pada tahun 1875 beberapa sekolah untuk perempuan diresmikan, di antaranya adalah *Tokyo Joshi Shihan Gakkō* (*Tokyo Women's Normal School*), *Meiji Jyogakkō* (*Meiji Women's College*) dan *Tokyo Jyogakkō* (*Tokyo Woman School*). Anak laki-laki dan perempuan ditempatkan dikelas yang berbeda. Anak laki-laki diajarkan pengetahuan, strategi, militer dan kekuatan fisik, sedangkan anak wanita diajarkan menjahit, keterampilan, sastra Jepang dan bahasa asing. (Henshall, 2004, 83).

Ayumi Sasagawa (2004, 173) menjelaskan bahwa faktor terpenting yang menyebabkan hari ini perempuan Jepang lebih memilih tetap berada dalam karir atau universitas adalah karena adanya tekanan masyarakat mengenai mitos "*motherhood*", yang secara turun temurun menempatkan perempuan hanya pada kelas terbawah dalam keluarga. Mitos bahwa kehidupan perempuan Jepang itu hanya berkisar pada pengabdian kepada tiga laki-laki yaitu: ayah, suami dan anak laki-lakinya akhirnya membentuk sebuah resistensi pada pergerakan kaum perempuan untuk mengikuti apa yang diidealkan sebagai perempuan Jepang di masa lalu.

Begitu juga dengan laki-laki di Jepang, apabila "*ryousai kenbo*" (*good mother dan wise mother*)" adalah nilai yang diinternalisasikan sebagai nilai dasar bagi perempuan Jepang, maka laki-laki Jepang dididik dengan nilai-nilai kesatria yang tercantum dalam kode etik samurai atau Bushido yang berlaku pada zaman Edo (feodal). Selain memikul tanggung jawab kepada seluruh anggota keluarganya tetapi laki-

laki dan ayah juga sebagai pusat penentu dalam setiap hal yang disebut sebagai master atau tuan. (Cherry, 1987, 66).

Sebagai master atau tuan, suami atau para laki-laki di Jepang seringkali disalahkan sebagai kelompok yang menyebabkan resistensi dari kelompok feminis progresif Jepang. Semenjak Jepang mengalami penurunan angka kelahiran yang berturut-turut dari tahun 2004, kelompok laki-laki Jepang juga tidak luput dari tuduhan sebagai penyebab dari turunnya angka lahir tersebut. Ketidakhahaman laki-laki Jepang terhadap urusan domestik dan anak menyebabkan kewajiban pengurusan hal-hal yang bersifat domestik dan anak menjadi hak eksklusif kelompok perempuan Jepang saja. Tidak peka, kaku, dan seperti mesin pencetak uang begitulah stereotype para ayah di Jepang hari ini.

Perilaku laki-laki Jepang tersebut disebabkan masih adanya pemahaman yang menganggap perempuan Jepang seperti "swalayan" yang buka selama 24 jam, di mana perempuan diharapkan untuk selalu sigap menyediakan berbagai keperluan pria dari menyediakan makanan, pakaian, kamar mandi, urusan anak, kebersihan rumah dan lainnya. Hal ini pula yang menjadi salah satu di antara banyak alasan perempuan memiliki keraguan untuk menikah.

"Nowadays marriage is no longer as appealing as it used to be...., a young women will hesitate for some time before committing herself to marriage motherhood, to have reconcile work and children—a quasiutopic gamble given the physical exertion and extraordinarily, strong constitution this demands—or resign herself to the gloomy, empty tedium of a housewife's life. Whatever path she chooses, marriage is no longer synonymous with happiness and young women are openly admitting that these days they are not interested in the traditional male who expects his wife to take on all the domestic chores or who only will 'tolerate' her job as long as this does not impinge on his comfort. this days there is no reason to have a mediocre marriage."

(Jolivet, 2004, 164)

Gambaran mengenai wanita yang "ideal" yang harus dilakukan dalam konteks

budaya patriarki Jepang ini juga dapat dilihat dari berbagai pengalaman yang terekam pada berbagai lembaga konsultasi keluarga. Banyak kaum perempuan Jepang yang mengeluhkan kelelahan baik secara fisik maupun mental setelah mereka kelahiran anak pertama. Budaya Jepang menuntut kesempurnaan seorang perempuan dalam mengurus urusan domestik dan anak dan menyebabkan suami menganggap bahwa urusan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan.

"My husband, a business man, always come late and I can go all day without speaking to anyone. Since I became pregnant I have been permanently shut up at home and feel completely cut off from the outside world. All my friends work and my husband comes home so tired that he falls a sleep without saying a word to me; it is so bad that I can go the whole day without having occasion to open my mouth and utter a single word .

(Jolivet, 2004, 11)

Di sisi lain, *sararyman* profesi yang mendominasi para ayah ini luput dari perhatian. Ayah-ayah di Jepang dari generasi zaman Edo, Meiji sampai masa Hesei merupakan kelompok yang memang dibentuk sesuai kebutuhan dan kepentingan negara yaitu untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara Barat yang dikenal melalui slogan "kejar dan lampau Barat!". Sampai kemudian muncullah gerakan "Fathering Japan", sebuah *Non Profit Organization* (NPO) yang dibentuk oleh Tetsuya Ando. Organisasi ini dibentuk pada tahun 2006 sebagai wujud kepedulian Ando terhadap kondisi para ayah di Jepang hari ini. Melalui organisasi ini Ando berharap dapat mendorong perubahan di Jepang sekarang dan kedepannya agar para ayah di Jepang dapat ikut berperan aktif dalam ikut serta membesarkan anak. Saat ini organisasi ini sudah beranggotakan lebih dari 400 ribu orang, yang rata-rata berprofesi sebagai *sararyman*. Ando sendiri adalah seorang ayah dari tiga anak yang membesarkan anak bersama istri yang bekerja sebagai full time worker. *Spirit* Ando dalam membentuk organisasi ini tidak terlepas dari pengalaman hidupnya sendiri yang memiliki pengalaman pahit di masa kecilnya. Dalam pernyataannya Ando mengungkapkan: "*I didn't*

like my own father, who was a negative example to me, so I wanted to become the complete opposite, and become role model". (Maruko, 2018).

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebuah tinjauan tentang "Bagaimana diskursus alternatif yang dilakukan "fathering Japan" (NPO) untuk merubah hegemoni ketidaksetaraan gender di Jepang"?

DISKURSUS DAN DISKURSUS ALTERNATIF

Ernesto dan Chantal Mouffe dalam buku "*Discourse Analysis as Theory and Method*" menjelaskan bahwa pembentukan suatu makna sebagai sebuah proses sosial adalah mengenai fiksasi atau penetapan sebuah makna. Disinilah teori diskursus selanjutnya digunakan untuk memahami proses berjalannya penetapan makna dari suatu simbol, proses yang hingga pada akhirnya berhasil membuat suatu makna dianggap sebagai sesuatu yang natural adanya. Laclau dan Mouffe juga menjelaskan beberapa konsep penting yang dapat membantu memahami teori diskursus sesuai dengan pernyataan nya berikut ini :

"[w]e will call articulation any practice establishing a relation among elements such that their identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from the articulatory practice, we will call discourse. The differential position, insofar as they appear articulated within a discourse, we will call moments. By contrast, we will call element any difference that is not discursively articulated." (Jorgensen & Phillips, 2002, 26).

Lebih lanjut Jorgensen & Phillips menjelaskan (2002, 26) bahwa diskursus dilihat sebagai penetapan suatu makna pada suatu area tertentu, setiap simbol di dalam diskursus adalah moments, dan makna dari setiap simbol ditentukan oleh relasinya dengan simbol lainnya. Diskursus juga terbentuk atas penetapan makna dari *nadal point*. *Nadal point* adalah sebuah simbol istimewa yang dapat menentukan makna dari simbol lainnya berdasarkan relasinya

dengan suatu *nadal point*, sebagai contoh pada diskursus medis, tubuh merupakan sebuah *nadal point*, dan simbol-simbol lainnya seperti gejala penyakit, jaringan tubuh dan pisau bedah akhirnya mendapatkan makna masing masing akibat relasinya dengan tubuh.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa didalam diskursus, simbol merupakan sebuah moment berdasarkan relasinya dengan simbol lain. Proses tersebut dilakukan dengan cara mengeksklusi kemungkinan adanya makna lain yang dapat dimiliki oleh suatu simbol. Proses eksklusi makna didalam suatu diskursus ini disebut sebagai “*field of discursiveness*”, sehingga didalam proses ini suatu makna yang dimiliki oleh sebuah simbol pada diskursus lainnya akan dieksklusi pada diskursus tertentu untuk membentuk sebuah kesatuan makna. (Jorgensen & Phillips, 2002, 27)

Namun Laclau dan Mouffe berpendapat bahwa didalam sebuah diskursus suatu kesatuan makna yang tetap tidak semudah itu ditentukan hingga terbentuklah konsep *element*. *Element* merupakan sebuah simbol yang belum memiliki suatu makna tetap karena simbol tersebut memiliki beberapa makna atau polisemik. Sehingga diskursus akan berupaya untuk mengubah element menjadi sebuah moment dengan mereduksi sifat polisemiknya menjadi suatu makna yang tetap melalui *closure*, yaitu dengan menghentikan ketidaktepatan makna pada suatu simbol, meskipun *closure* ini tidak dapat dipastikan berhasil untuk menciptakan suatu makna yang pasti. Laclau dan Mouffe kemudian menjelaskan lebih lanjut, bahwa tubuh dapat dilihat sebagai element karena terdapat beberapa cara untuk memahaminya. Seperti misalnya dalam diskursus medis barat, tubuh dapat direduksi menjadi moment dengan mendefinisikannya secara jelas begitu juga dengan diskursus pengobatan alternatif, namun pada diskursus agama Kristen tubuh menjadi dihubungkan dengan simbol kejiwaan. Dengan ini makna tubuh pun menjadi tidak jelas sehingga harus memiliki sebuah makna, yang terjadi melalui proses *articulation*. (Jorgensen & Phillips, 2002, 27-28).

Articulation merupakan sebuah praktek yang menetapkan relasi antara *elements* yang

kemudian identitas dari *elements* tersebut dimodifikasi. Kata tubuh yang sebelumnya dibahas kini bersifat polisemik dan identitasnya ditentukan dengan relasi kepada kata lainnya melalui *articulation*, seperti relasi antara kata tubuh dan jiwa yang membawa kepada diskursus religi. Tubuh pun kini bisa menjadi *nadal point* bagi diskursus medis dan juga element dalam waktu yang bersamaan, sesuai penjelasan sebelumnya *nadal point* merupakan simbol istimewa didalam sebuah dikursus, namun simbol ini tidak memiliki makna apapun ketika berdiri sendiri, maka dari itu simbol tubuh ini dapat menjadi element juga. *Floating Signifiers*, merupakan istilah yang digunakan Laclau dan Mouffe terhadap sebuah element yang dapat memiliki berbagai makna. *Floating Signifiers* diartikan sebagai simbol yang diperdebatkan oleh berbagai diskursus untuk menentukan makna tetapnya, dengan demikian tubuh menjadi *nadal point* bagi diskursus medis, dan juga menjadi *floating signifiers* diantara perdebatan oleh diskursus medis dan diskursus pengobatan alternatif. (Jorgensen & Phillips, 2002, 28-29).

Edward said dalam karyanya *Orientalisme* (1979) memfokuskan telaah pada dimensi diskursus kolonialisme. Said (1979, 3) dengan kritis meneliti cara *Orientalisme*, sebagai sebuah diskursus, yang menggambarkan timur secara “politis, sosial, militer, ideologis, ilmiah, dan imajinatif”. Secara akademis, *Orientalisme* terwujud dalam sebuah fenomena yang didasarkan pada ekspansi baru, tetapi juga sekumpulan teori yang dibangun dari beberapa asumsi, kepercayaan, dan ideologi seperangkat disiplin yang mempelajari Timur. Ciri utama *Orientalisme* adalah adanya pembagian Timur-Barat yang menempatkan masyarakat Barat, secara kebudayaan, religi, dan bahasa Barat lebih unggul daripada Timur. *Orientalisme* adalah sebuah gaya pemikiran yang didasarkan pada perbedaan ontologis dan epistemologis antara “Timur” dan (kebanyakan) “Barat”. (Alatas, 2010, 28-29).

Dalam hal ini gerakan non-profit ‘*Fathering Jepang*’, dapat dikatakan merupakan gerakan sosial yang mencoba hadir ditengah hegemoni nilai tradisional Jepang yang mencoba untuk membentuk diskursus baru ditengah

mitos stereotype gender tersebut. Bahwa nilai tradisional seperti pembagian peran melalui “*ryousai kenbo*” (*wise mother and good mother*) dan juga kode etik samurai yang berlaku bagi laki-laki pada masa feodal dulu telah membentuk karakter keluarga tradisional Jepang yang juga berpengaruh terhadap dinamika perkembangan keluarga modern Jepang saat ini. Untuk itu gerakan ini merupakan gerakan yang mengkritisi dikotomi peran laki-laki dan perempuan tradisional Jepang dengan mencoba membuat diskursus baru atau sebagai diskursus alternatif dari hegemoni nilai yang sudah ada sebelumnya.

BUDAYA PATRIARKI DAN KETIDAKSETARAAN GENDER DI JEPANG

Menarik untuk mengkaji persoalan ketidaksetaraan gender di Jepang dengan sebelumnya menelusuri terlebih dahulu budaya patriarki Jepang. Sebagai negara yang dikenal selalu memegang nilai-nilai luhur, Jepang hari ini berhasil membangun imaji sebagai negara yang dianggap berwajah dua yaitu dimana kemajuan atau modernisasi mendominasi hiasan perkotaan dan di satu sisi balutan nilai-nilai tradisional masih juga melekat dan dipelihara. Dalam sejarahnya pembagian peran gender di Jepang sudah terjadi pada masa awal dari zaman feodal keshogunan Edo (1603-1868). Dibawah kekuasaan Tokugawa, pemerintahan Jepang didominasi oleh pria. Di masa inilah peranan baik laki-laki dan perempuan Jepang telah diatur secara tertulis yang menjadi falsafah kehidupan masyarakat Jepang melalui kode etik samurai yang berlaku bagi laki-laki dan juga perempuan. (Widarahesty & Ayu, 2016).

Pada praktiknya walaupun dominasi kelompok laki-laki di Jepang telah berjalan dari masa monarki sampai feodal namun dalam perjalanan sejarahnya perempuan Jepang ternyata juga telah berkontribusi sangat besar terhadap negara. Pada masa perang Dunia II misalnya, perempuan-perempuan Jepang hadir mengisi kekosongan peran laki-laki dalam bidang industri di Jepang. Pada masa modernisasi ke II inilah awal dari perempuan-perempuan Jepang hadir menjalani dualisme fungsi, yaitu

bertanggung jawab secara domestik dan juga sebagai penunjang finansial.

Kondisi tersebut tentu berbeda sekali dengan kondisi perempuan Jepang pada saat masa feodal, dimana nilai-nilai tradisional sangat memberlakukan peraturan yang sangat ketat dan kaku untuk perempuan Jepang. Hal tersebut dapat dilihat pada sebuah teks “moral” yang dibawa oleh Kaibara Ekken (1630-1714) yaitu *Onna daigaku (Greater Learning for Women)* yang menyarankan wanita untuk “tidak pergi keluar rumah untuk urusan yang bukan kebutuhan, tapi tetap tinggal dirumah, menjahit pakaian untuk mertua mereka, memasak makanan, melayani suami, mencuci dan melipat pakaian, menyapu lantai dan membesarkan anak”(Sakai, 1939, 43-56) bahkan wanita harus dapat menerima keabsahan 7 alasan pria menceraikan mereka, meliputi ketidakpatuhan, banyak bicara (cerewet) dan kemandulan, boros, mencuri uang suami, melawan mertua dan lain-lain.

Idealisasi perempuan Jepang ini dapat dilihat dari gambaran-gambaran tentang perempuan ideal Jepang pada zaman Edo dan Meiji yang dikenal dengan sebutan “*Edo Mama*” dan “*Meiji Mama*”. Dalam sebuah ajaran *Bushido (the code of Samurai)*, dijelaskan secara terperinci apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban dari seorang perempuan khususnya setelah menikah. Dalam ajaran tersebut menjelaskan bahwa ketika sudah menikah dan menjadi seorang ibu maka menjadi mulia apabila dalam kesehariannya dia (ibu) menjadi yang paling awal bangun daripada anggota keluarga lainnya dan yang paling akhir tidur dari anggota keluarga lainnya. Hal ini seperti yang digambarkan melalui kisah Takuma Takeshi (generasi 1990-an) tentang ibunya:

“No one of my generation ever saw his mother asleep. By the time I got up in the morning, mine had already been up for some time, busy preparing my breakfast and packing lunch for school. At night, while I was sleeping, mother would be darning socks or busy doing something else. I have no idea when she went to bed.” (Jolivet, 2004, 109)

Kisah mengenai ibu dari Takuma Takeshi diatas adalah satu diantara banyak cerita ibu-ibu Jepang pada jaman Edo dan Meiji. Idealisasi peranan perempuan ini juga terekam

dalam sebuah kisah yang sangat terkenal dalam sejarah sinema Jepang, yaitu kisah tentang seorang perempuan yang tegar dan kuat dalam menjalani kehidupannya dari menjadi seorang anak perempuan, istri, menantu dan menjadi ibu, kisah itu adalah "Oshin".

"Oshin is the name of the heroine of television drama that went out twice a day for a year, whose viewing figures broke all previous records (98 percent). Oshin is much more than the epitome of the good wife and wise mother, she is courageous, hard working and preservering."

(Jolivet, 2004, 107)

Hirai Nobuyoshi menjelaskan bahwa kesuksesan yang luar biasa yang diraih dari drama "Oshin" ini dikarenakan "Oshin" telah berhasil menggambarkan perempuan ideal yang dibentuk sesuai budaya patriarki Jepang di masa sebelum perang. Otoritas yang besar terletak pada laki-laki menempatkan perempuan sebagai kelompok yang tunduk dan taat kepada superioritas laki-laki. Pengorbanan yang didedikasikan kepada suami, ibu dari suami dan anaknya adalah sebuah simbol perjuangan yang menjadikannya sebagai "good mother" dan "wise mother". (Jolivet, 2004, 108).

Gambaran mengenai wanita "ideal" yang bagaimana yang harus dilakukan dalam konteks budaya patriarki Jepang ini juga dapat dilihat dari berbagai pengalaman yang terekam pada berbagai lembaga konsultasi keluarga. Banyak kaum perempuan Jepang yang mengeluhkan kelelahan baik secara fisik maupun mental setelah mereka memiliki pengalaman pada anak pertama yang dimilikinya. Bahwa budaya Jepang yang menuntut kesempurnaan seorang perempuan dalam mengurus urusan domestik dan anak menyebabkan banyaknya suami yang akhirnya menganggap bahwa urusan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab perempuan.

Hal tersebut akhirnya menjadi satu diantara alasan banyak wanita Jepang saat ini yang memutuskan hanya memiliki satu anak atau dalam istilah Jepang disebut dengan fenomena "hitoriko" sebagai bentuk resistensi dari langgengnya budaya patriarki di Jepang. *Hitoriko* adalah suatu kondisi pasca melahirkan disaat banyak wanita membutuhkan banyak bantuan tangan dari berbagai pihak, tetapi

justru dalam budaya masyarakat Jepang wanita diharuskan menghadapinya seorang diri. Hal tersebut merupakan kebiasaan masa lalu dimana idealnya keberhasilan wanita dilihat dari kemampuannya mengatur secara alami dan mandiri hal-hal terkait "motherhood". Budaya inilah yang menyebabkan banyak wanita Jepang mengalami depresi yang berkepanjangan.

Kemandirian ini dalam budaya masyarakat Jepang juga dikenal sebagai "Mother Ideology" yang terkenal dengan ungkapannya yaitu "okaasan gambareron" (Jolivet, 2004, 9) yang artinya "ayo ibu jangan menyerah". Namun yang terjadi justru mendorong gerakan perempuan yang tidak lagi dapat menerima suatu kondisi yang menempatkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan yang bersifat "motherhood".

"The drop in the birthrate shows that Japanese women are finding it increasingly it difficult to accept the terms and conditions of motherhood". (Jolivet, 2004, 1)

Budaya patriarki ini juga dapat dilihat melalui tiga kata yang sangat terkenal dalam budaya Jepang yang wajib dikerjakan isteri-isteri di Jepang, tiga kata tersebut adalah; Meshi! Furo! Neru!, (makan! mandi! tidur!) tiga kata tersebut menjadi tiga kata yang fenomenal yang paling sering diucapkan oleh suami-suami di Jepang seiring dengan keberhasilan Jepang menjadi negara "miracle economy", bahkan ada sebuah *joke* menyatakan bahwa laki-laki Jepang begitu luar biasa sibuk sehingga hanya tiga kata tersebut yang sempat mereka ucapkan di rumah. (Cherry, 1987, 62) *Meshi!* artinya siapkan makan yang biasa diucapkan suami-suami Jepang sepulang dari lembur bekerja pada malam hari, lalu *furo!* yaitu siapkan air hangat untuk mandi, dan *neru!* siapkan tempat tidur untuk tidur.

RESPON PEMERINTAH JEPANG TERHADAP KETIDAKSETARAAN GENDER

Perempuan Jepang hari ini dianggap telah mencapai perkembangan yang luar biasa. Modernisasi dianggap telah berhasil membawa perubahan signifikan pada level pendidikan untuk perempuan Jepang. Saat ini perempuan

Jepang dianggap lebih senang untuk mengejar pendidikan di Universitas dengan persentase yang lebih tinggi angkanya ketimbang laki-laki, yaitu 59% untuk perempuan dan 52% untuk laki-laki. Namun tetap saja persoalan ketidaksetaraan gender masih banyak terjadi di Jepang. Menurut penelitian angka ketidaksetaraan tersebut terus meningkat dari 15% terus meningkat menjadi 40% yang ditandai dengan kesulitan perempuan-perempuan Jepang untuk bisa memperoleh posisi berpengaruh atau level atas di dalam suatu organisasi atau perusahaan. (OECD, 2007)

Berdasarkan Forum Ekonomi Dunia, Jepang merupakan salah satu negara terburuk dalam implementasi kesetaraan gender bila dibandingkan dengan negara-negara maju dunia lainnya. Bahkan posisi Jepang dalam persoalan kesetaraan gender berada dibawah Tajikistan dan Indonesia pada tahun 2014, dan pada tahun 2017 peningkatan perempuan di dunia kerja memang signifikan tetapi angka perempuan Jepang dalam bidang politik masih terbelah rendah. (Economic Forum, 2017)

Ketidaksetaraan tersebut juga diakui oleh perempuan Jepang dalam persoalan kehidupan pribadi, yaitu kesulitan tentang bagaimana dapat mengatur atau menyetarakan kehidupan bekerja dan urusan domestik rumah bagi perempuan yang sudah bekerja. Pemerintah Jepang sudah membuat sebuah kebijakan untuk menanggulangi persoalan tersebut dengan menyediakan lembaga penitipan anak (*child care*). Namun tetap saja pilihan yang akhirnya ditempuh oleh perempuan Jepang adalah meninggalkan pekerjaan atau karirnya atau sampai pada keputusan untuk tidak menikah.

Pilihan tersebut memang merupakan pilihan yang dilematis dan sulit bagi perempuan Jepang, namun hal tersebut menjadi fenomena umum dikarenakan kebijakan di lapangan atau perusahaan terkadang belum bersinergi dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, disisi lain adalah adanya persoalan budaya masyarakat Jepang yaitu laki-laki Jepang yang memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat sedikit untuk persoalan parenting dan domestik. Hal tersebut tentunya ditunjukkan

dengan budaya jam kerja laki-laki di Jepang atau budaya lembur yang sangat panjang.

Sebagai respon terkait persoalan ketimpangan gender tersebut, pemerintah Jepang membuat berbagai kebijakan. Berikut adalah 15 prioritas kebijakan pemerintah Jepang yang mengatur terkait persoalan gender yang dilihat dari hasil implementasi deklarasi Beijing(2000):

Isi dari deklarasi Beijing tersebut yaitu: *15 Priority Fields in the Basic Plan (those with a star were newly set (i) Expansion of women's participation in policy decision-making processes; (ii) Reconsideration of social systems and practices and raise awareness from a gender-equal perspective(iii) Gender equality for men and children; iv) Securing of equal opportunities and treatment between men and women in employment; (v) Men's and women's work-life balance; (vi) Promotion of gender equality aimed at bringing about vibrant agricultural, forestry, and fisheries communities; (vii) Support for men and women facing living difficulties such as poverty; (viii) Creation of an environment in which people such as the elderly, the disabled, and non-Japanese people can live comfortably; (ix) Elimination of all forms of violence against women; (x) Support for women's lifelong health; (xi) Enhancement of education and learning to promote gender equality and to facilitate diversity of choice; (xii) Gender equality in science and technology and academic fields; (xiii) Promotion of gender equality in the media; (xiv) Promotion of gender equality in the area of regional development, disaster prevention, environment, and others; (xv) Respect for international regulations and contributions to the "Equality, Development and Peace" of the global community.*

Dari kebijakan yang telah disusun dalam 15 prioritas tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah Jepang telah mengupayakan terciptanya kesetaraan gender di Jepang, yang tentunya diharapkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan tersebut bukan saja dibuat demi kepentingan kelompok baik laki-laki atau perempuan saja, namun pemerintah disini juga memiliki kepentingan khusus agar terciptanya kondisi yang setara tersebut dapat bersinergi dengan kondisi perekonomian Jepang saat ini, yang mana kontribusi baik dari laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi Jepang. Namun tentunya

implementasi tersebut masih sulit diukur keberhasilannya saat ini. Terutama budaya patriarki yang sudah melekat bagaikan mitos cukup sulit untuk dibongkar formasinya. Apalagi fenomena jam kerja berlebih atau lembur untuk pegawai menjadi kendala tersendiri dalam membongkar mitos terkait *gender stereotype* di Jepang ini.

Budaya jam kerja yang panjang atau budaya lembur itu sendiri, memang bukan hal yang baru di Jepang. Budaya kerja tersebut sudah menjadi warisan budaya hasil dari masa kemonarkian Jepang beratus-ratus tahun lalu lamanya. Melalui kerajaan Yamato, nilai semangat kerja termaktub dalam falsafah bangsa Jepang melalui undang-undang pertamanya yang disebut dengan "*Jyuu nana kenpou*" yaitu undang-undang 17 pasal yaitu pasal 8,9 dan 10. Isi dari pasal tersebut menitikberatkan pada aspek tanggung jawab pekerjaan. Nilai-nilai yang diambil dari berbagai ajaran seperti konfusius dan buddha banyak mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Jepang, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti berikut ini diantaranya adalah menitikberatkan pada persoalan tanggung jawab kerja. (Koyu, 2006, 360)

- 1) Bersahabatlah dengan sesama manusia, dan saling bekerja sama adalah hal yang utama,
- 2) Percayalah terhadap isi dari ajaran Buddha,
- 3) Janganlah memerintah (menyuruh) *Tenno*,
- 4) Para pekerja negara haruslah memiliki jiwa hormat dan rasa terima kasih,
- 5) Kalau rasa hormat itu dipelihara maka alam akan seimbang,
- 6) Apabila para pekerja negara menerima gugatan yang dikeluhkan dari masyarakat, maka janganlah menyelesaikannya dengan menerima suap,
- 7) Berani mengatakan bahwa yang salah itu salah dan yang benar itu benar, karena ini sudah menjadi kebiasaan bangsa Jepang sejak dahulu,
- 8) Bekerjalah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing,
- 9) Para pekerja bekerjalah dari pagi-pagi sekali sampai larut malam dengan penuh semangat,
- 10) Pondasi manusia adalah ketulusan, kalau setiap pekerja memiliki ketulusan dalam bekerja, maka dia akan memperoleh pencapaian yang baik,
- 11) Janganlah pernah menunjukkan wajah marah, dan memaksakan kehendak sendiri terhadap

- yang lain,
- 12) Barangsiapa bekerja keras dia akan mendapat pujian,
- 13) barangsiapa banyak melakukan perbuatan buruk maka ia akan tercela,
- 14) Lakukanlah pekerjaan dengan perasaan penuh kewajiban dengan mengetahui pekerjaan tersebut dengan baik,
- 15) Kepala negara adalah kaisar,
- 16) Kaisar tidak perlu membayar pajak,
- 17) Janganlah iri hati/ dengki.

Kemampuan Jepang dalam mengejar ketertinggalannya dari bangsa Barat menjadi perhatian dunia terutama ketika Ezra Voegl melalui karyanya yang ternama berjudul "*Japan as Number One*" muncul menjadi alternatif baru ditengah hegemon bangsa barat khususnya Amerika. Semenjak itu, perhatian dunia tertuju kepada Jepang. Keberhasilan ini menjadi perhatian banyak pihak. Bagaimana Jepang dianggap mampu bangkit dari keterpurukan akibat kalah perang pada masa Perang Dunia II. Setelah itu segala hal yang tercipta dari anak bangsa terbalut dari rasa nasionalisme yang tinggi. Semua produk-produk Jepang mampu menyaingi produk bangsa barat, bahkan mengalihkan dan menjadi *newcomer* sebagai kekuatan baru di Asia.

Tentunya semua itu tidak dapat dilepaskan dari sumber daya manusia Jepang. "Pahlawan-pahlawan kerah Putih" seperti yang sudah dijelaskan di atas memiliki andil dan kontribusi yang luar biasa dalam membangun Jepang pada masa modernisasi. Ayah atau laki-laki Jepang memang dibentuk sebagai penopang ekonomi, hal tersebut bersinergi dengan kebijakan pemerintah Jepang yang berkiblat pada neoliberalisme. Aura kapitalisme dan liberalisme menjadi bahan bakar yang terus diusung oleh elit kuasa dalam membangun kesadaran semu masyarakatnya, yaitu loyalitas pada perusahaan yang seakan menjadi "keharusan", yang mencerminkan integritas dan kualitas seseorang.

Pada akhirnya ketidaksetaraan gender yang selama ini diperjuangkan dan disuarakan oleh kelompok perempuan Jepang dalam ranah kerja, karir ataupun pendidikan, seyogyanya juga menjadi pertarungan kelompok laki-laki di Jepang. Budaya patriarki yang dipersoalkan sebagai salah satu penyebab turunnya angka demografi di Jepang, "robot" yang "kaku"

dan “berhati dingin”, serta berbagai julukan yang ditujukan kepada para lelaki Jepang, sebetulnya menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ini berada pada dua arah. Artinya baik laki-laki dan perempuan Jepang keduanya merupakan bagian dari “korban” diskursus Pemerintah yang berusaha mengatur dengan powernya terhadap tubuh manusia agar patuh dan taat. Konstuksi tersebut terlihat melalui idealisasi nilai-nilai “ryousai kenbou” bagi perempuan Jepang, dan sistem keluarga Ie yaitu sistem keluarga tradisional Jepang. Walaupun sistem keluarga tradisional Ie tersebut sudah dihapuskan pasca PD II dalam konstistusi 1947, namun bagi sebagian masyarakat Jepang hal tersebut masih menjadi landasan kehidupan keluarga mereka.

Sebagai orang yang diposisikan paling bertanggung jawab pada “rumah“ dan seisinya, maka dalam pandangan masyarakat Jepang setiap fenomena yang terjadi dalam masyarakat Jepang seperti degradasi nilai pada generasi muda, kekerasan dalam sekolah, semua perhatian akan tertuju kepada perempuan. Masyarakat akan menyalahkan karena hal tersebut tidak akan terjadi apabila mereka patuh dan berkonsentrasi dalam mendidik anak di rumah bukannya sibuk bekerja. (Jolivet, 2004, 78). Dalam budaya Jepang, peranan ibu sangatlah besar dalam mengantarkan anak dari satu gerbang ke gerbang lainnya dari TK, SD, SMP, SMA sampai bangku kuliah keberhasilan tersebut berada di tangan seorang ibu, budaya ini dikenal dengan sebutan “*kyouiku mama*“ (Jolivet, 2004, 120) atau didikan ibu.

Disisi lain seorang ayah dalam budaya masyarakat Jepang memang diposisikan sebagai tuan atau master yang bertanggung jawab secara finansial dalam keluarga, bukan mengurus urusan anak dan domestik. Pembagian peranan inilah yang menjadi resistensi kelompok feminis Jepang, ketika modernisasi sudah berhasil menggeser peranan perempuan yang tadinya hanya di rumah, kini mampu menempatkan perempuan juga sebagai aktor penyokong finansial. Sayangnya, dalam urusan domestik tidak ada pergeseran peranan yang dilakukan oleh suami dalam upaya membantu urusan domestik dan anak. Alih-alih sebagai ideologi “*gambareron mama*“, hal ini justru menjadi hal yang sangat

memberatkan bagi kaum perempuan Jepang. Pada akhirnya pilihannya adalah menjadi “*good mother*“ dengan totalitas di rumah atau “*career women*“ tanpa memiliki anak yang kemudian kembali menuding perempuan sebagai akar permasalahan yang menyebabkan penurunan angka kelahiran karena terlalu egois dalam memikirkan dirinya sendiri. Fenomena resistensi ini terjadi karena berdasarkan pandangan Juliet Mitchell bahwa kunci bagi penindasan atas perempuan terletak dalam ”peran ideologis dan sosio-ekonomi sebagai ibu dan pengurus rumah tangga“. Menurut subordinasi perempuan ditopang melalui ”*hegemoni maskulin*“ yang beroperasi pada ”keluarga sebagai unit ekonomi“. (Widarahesty & Ayu, 2016)

Akibatnya, bagi laki-laki Jepang ketidaksetaraan tersebut terletak pada kepemilikan ranah domestik dan kepengurusan anak secara eksklusif yang hanya menjadi milik perempuan saja. Kesibukan luar biasa dari ayah-ayah di Jepang berdampak pada minimnya waktu yang dimiliki dengan anak-anak mereka. Bahkan, diperkirakan sekitar 16.1 persen ayah-ayah di Jepang sama sekali tidak memiliki kontak dengan anak-anak mereka dan tidak ingin mengganti waktu yang hilang tersebut di saat liburan. (Jolivet, 2004, 64) Menurut ahli antropologi Jepang, Kara Hiroko, yang menyebabkan laki-laki tidak tertarik ikut ambil bagian dalam urusan domestik dan pengurusan anak adalah karena hal-hal yang terkait dengan urusan anak menjadi milik eksklusif kaum perempuan dan tidak pernah ada studi yang merekam atau mengajarkan laki-laki melakukan hal yang berkaitan dengan anak. (Jolivet, 2004, 64)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Yamaguchi yang menjelaskan bahwa ada beberapa ide yang menjadi kata kunci yang menyebabkan persoalan gender hari ini masih hadir di Jepang, yaitu: (Kincaid, 2016):

“Men should work outside the home, Genders should be brought up differently, Women are more suited to household work and child rearing than men., Full time housewives are valuable to society because of their family raising role.”

Untuk itu pemerintah Jepang saat ini gencar dalam mengkampanyekan upaya terciptanya

kesetaraan gender, berbagai upaya dilakukan dari kebijakan perusahaan yang harus dirubah dan diselaraskan dengan kondisi maternal perempuan sampai kebijakan *Abenomics* dan *womenomics* yang diusung oleh pemerintah Shinzo Abe. Adapun hal tersebut juga dapat dilihat melalui 15 prioritas “*Basic Plan*” untuk upaya tercapainya kesetaraan gender di Jepang berikut ini (Basic Plan Gender Equality, 2016):

1) *Proportion of female candidates to be members of the House of Representatives: 16.7% (2009) →30% (2020)*, 2) *Proportion of female candidates to be members of the House of Councilors: 22.9% (2010) →30% (2020)*, 3) *Proportion of female public prosecutors: 18.2% (2009) →23% (end of fiscal 2015)*, 4) *Proportion of female national public employees through the recruitment examination: 26.1% (fiscal 2010) →approx. 30% (end of fiscal 2015)*, 5) *Proportion of female national public employees through the Level I recruitment examination (University graduate level) for national civil service: 25.7% (fiscal 2010) →approx. 30%*, 6) *Proportion of women in government positions equivalent to or higher than director of central government regional organizations or assistant director of central government ministries and agencies: 5.1% (fiscal 2008) →approx. 10% (end of fiscal 2015)*, 7) *Proportion of women in government positions equivalent to or higher than the director of the central government ministries and agencies: 2.2% (fiscal 2008) →approx. 5% (end of fiscal 2015)*, 8) *Proportion of women in positions equivalent to designated central government positions: 1.7% (fiscal 2008) →approx. 3% (end of fiscal 2015)*, 9) *Percentage of male national public employees who take child care leave: 0.7% (fiscal 2008) →13% (2020)*, 10) *Proportion of female members of national advisory councils and committees: 33.2% (2009) →between 40% and 60% (2020)*, 11) *Proportion of female expert members of national advisory councils and committees: 16.5% (2009) →30% (2020)*, 12) *Proportion of female local public employees through the recruitment examination for prefectural governments (advanced level examination) 21.3% (2008) →approx. 30% (end of fiscal 2015)*, 13) *Proportion of women in positions equivalent to or higher than the director of a prefectural government office: 5.7% (2009) →approx. 10% (end of fiscal 2015)*, 14) *Percentage of male local public employees who take child care leave: 0.6% (fiscal 2008) →13% (2020)*, 15) *Proportion of female members of prefectural government advisory councils and committees: 28.4% (2009) →30% (2015)*, 16) *Proportion of female members of city, town, or village government advisory councils and committees: 23.3% (2009) →30% (2015)*, 17) *Proportion of women in*

positions equivalent to or higher than section manager level in private corporation 6.5% (2009) →approx. 10% (2015)

Menarik kemudian untuk mencermati bahwa dari prioritas ‘*basic plan*’ yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang terdapat upaya peningkatan angka partisipasi laki-laki dalam pengurusan anak yaitu dari angka 0,7 % pada tahun 2008 diharapkan meningkat menjadi 13 % pada tahun 2020. Hal ini tentu dilakukan oleh pemerintah Jepang sebagai upaya menanggulangi kondisi krisis demografi yang terus mengalami penurunan dari tahun 2004. Kemudian berikut adalah apa yang dilakukan oleh kelompok organisasi non-profit yang didirikan oleh para ayah di Jepang dalam upayanya ikut serta membentuk diskursus baru terhadap fenomena demografi yang diperkirakan mengancam keamanan Jepang saat ini.

DISKURSUS ALTERNATIF NPO FATHERING JEPANG (*IKUMEN*)

“Looking back I think it would be nice if I had openly admitted to my role as a father, and told everyone else what it is like being a father.”
(*Fathering Japan*, 2016)

Pada dasarnya gerakan ini berdiri untuk menciptakan ayah-ayah yang ‘bahagia’ di Jepang. Karena dengan ayah yang ‘bahagia’ maka ibu pun juga akan ‘bahagia’ dan begitu juga dengan anak-anak mereka. Hal tersebut menjadi hal yang mendesak bagi masyarakat Jepang, dikarenakan krisis yang dialami oleh orang tua pasca melahirkan sangat besar, dan tidak hanya menyerang kalangan Ibu-ibu saja, tetapi juga kalangan ayah di Jepang.

Hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa keluhan dari ibu-ibu Jepang yang terekam melalui *Childrearing neurosis baby line* yang menggambarkan kondisi mereka setelah kelahiran anak pertama mereka (Widarahesty & Ayu, 2016, 11):

“As I am nearing the end of my pregnancy, we have just moved into a flat on the eight floor of an eleven-storey block. We have a lot more space and room at last for the baby’s cot. And yet, when I look out over the alien landscape outside my window,

*I cannot hold back my tears when I see the Sky.
I must confess that once my husband has left for
work, no one ever comes to see me and I never go
out. All day I am subconsciously waiting for my
husband to return.”*

*”My husband, a business man, always come late
and I can go all day without speaking to anyone.
Since I became pregnant I have been permanently
shut up at home and feel completely cut off from the
outside world. All my friends work and my husband
comes home so tired that he falls a sleep without
saying a word to me; it is so bad that I can go the
whole day without having occasion to open my
mouth and utter a single word “*

Karakteristik utama pengasuhan di Jepang yaitu peran ibu lebih besar dibandingkan dengan peran ayah (Reiko, 2007, 36). Adanya sistem keluarga inti (*kaku kazoku*) di Jepang, yang anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu dan anak, mengharuskan orang tua untuk merawat anak mereka sendiri karena penggunaan pramusiwi (*baby sitter*) dan *daycare* apalagi pembantu sangat jarang di Jepang, sehingga ibu menjadi satu-satunya orang yang dianggap paling bertanggung jawab dalam pengasuhan anak. Rendahnya keterlibatan ayah dalam hal pengasuhan sangat erat kaitannya dengan pekerjaan sang ayah dimana kondisi pekerjaan dengan jam kerja yang sangat panjang, membuat ayah sulit berpartisipasi dalam hal mengurus anak. (Muhayarah, 2015)

Menurut Takeshi Tamura dalam jurnalnya yang berjudul *The Development of Family Therapy and The Experience of Fatherhood in Japanese Context* mengatakan bahwa pada zaman Edo (1600 – 1868), ayah berperan penuh dalam pengasuhan anak, namun setelah Perang Dunia II di mana industrialisasi berkembang pesat, keterlibatan ayah dalam pengasuhan kemudian menghilang ketika muncul konsep *katei* (rumah tangga). Ayah diharapkan berperan di ruang publik untuk pembentukan bangsa modern dan pada saat itu *salaryman* menjadi lambang dari maskulinitas di Jepang dan juga sebagai lambang dari kesuksesan (Tamura, 2011; Muhayarah, 2015).

Upaya yang dilakukan oleh NPO “*fathering Japan*” dalam upayanya untuk membangun

wacana baru lebih banyak berfokus pada bidang pendidikan, memberikan ceramah di perusahaan dan universitas lebih dari 200 kali dalam setahun dan memegang lokakarya buku bergambar untuk ayah dan anak-anak untuk mendukung ayah yang ada dalam pernikahan ataupun ayah single. Proyek-proyek lain yang dijalankan oleh NPO termasuk memberikan sumbangan bagi mereka yang tertimpa bencana gempa dan tsunami 2011, dan untuk keluarga tunggal ayah melalui French Toast Fund. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk mendukung ayah tunggal yang menghadapi kesulitan keuangan dan psikologis.

Gerakan “*Fathering Japan*” dan Ando juga berupaya melalui promosi yang berada dibawah proyek kementerian kesejahteraan. Mereka mempromosikan partisipasi laki-laki dalam “*ikuji*,” atau membesarkan anak, sehingga gelombang kecil perubahan telah diubah masyarakat Jepang, baru-baru ini dalam bentuk dua amandemen. Yang pertama yaitu amandemen hukum pada tahun 2009 yang berisi tentang undang-undang cuti perawatan anak, yang memberikan ibu dan ayah hak untuk mendapatkan waktu hingga 12 bulan cuti sampai anak mencapai usia 14 bulan secara bertahap, agar lebih banyak perusahaan mendorong ayah untuk mengambil cuti dan menemani keluarganya. Sebelum itu, setiap orang tua diizinkan untuk mengambil cuti sebelum anak mereka menginjak usia 12 bulan. Perubahan lain, yaitu pada tahun 2010 disediakan untuk tunjangan pengasuhan anak untuk keluarga tunggal ayah, bukan hanya keluarga tunggal ibu.

Kelompok “*Fathering Japan*” ini juga menginspirasi Proyek *Ikumen* dimana sejak diluncurkan oleh pemerintah yang dimulai tahun 2010 yang dibentuk oleh Departemen Kesehatan, Tenaga Kerja dan Welfare, dan pada tahun 2010 sampai dengan saat ini sudah ada 1.684 ayah yang menyatakan diri menjadi *ikumen* melalui proyek website *ikumen*.

Setelah itu, *Ikumen* menjadi salah satu kata yang paling populer di Jepang, dan ada banyak proyek oleh pemerintah yang dibuat berkaitan dengan Proyek *Ikumen*, dari film, drama, buku dll. Saat ini gerakan ini sudah menyebar ke 10 cabang di beberapa propinsi di Jepang dan

pemerintah juga memberikan dukungan finansial sebesar 5000.000 US Dollar. (Yan, 2016).

KESIMPULAN

Kebangkitan gerakan feminis telah menyebabkan pergeseran dalam peran gender dan juga pandangan terkait peran ayah. Ikumen sebagai wacana alternatif (*counter image*) dari dominasi atau hegemoni mitos stereotipe jender kemudian berkembang sebagai gerakan akar rumput. Mereka berhasil menarik perhatian media dan juga berhasil menarik perhatian pemerintah dan publik. Dampaknya, gerakan yang awalnya hanya berkisar komunitas berkembang sebagai gerakan ikumen yang didukung oleh pemerintah dan menjadi bagian dari upaya penanggulangan penurunan angka kelahiran di Jepang. Melalui diskursus ini diharapkan projek Ikumen Jepang ini dapat menjadi “imajinasi” Ideal untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan jender dalam kehidupan modern Jepang saat ini. Anggapan laki-laki Jepang yang selama ini dijuluki sebagai “pahlawan kerah putih” demi kenaikan laju ekonomi Jepang, ternyata justru menjadikan mereka sebagai kelompok yang tereliminasi dari kehidupan keseharian mereka sendiri. Namun terlepas dari keinginan atau upaya gerakan kelompok laki-laki ini untuk mendapatkan kembali tempatnya di ranah domestik dan berupaya menjadi “ayah yang bahagia”, dan juga upaya kelompok perempuan untuk meraih kesetaraan gender dalam berbagai aspek, bagi pemerintah Jepang sendiri diskursus baru (alternatif) ini penting, tentunya mengingat keduanya baik laki-laki maupun perempuan Jepang tersebut adalah jantung penggerak laju ekonomi Jepang hari ini dan ke depannya.

Tulisan ini mendapatkan Dana Hibah Dikti Dosen Pemula periode 2016. Untuk itu Ucapan Terima Kasih penulis tujukan kepada DIKTI dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M UAI yang telah memberikan dukungan dana seminar bagi penulis sebagai pemakalah dalam Simposium Internasional Aprish 2016.

PUSTAKA ACUAN

Alatas, S. F. (2010). *Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial Asia*. Bandung: Mizan Media Utama.

Atsuharu, S. (1939). “Kaibara Ekken and Onna Daigaku”. *Cultural Nippon*.

Cherry, K. (1987). *Women’s Word What Japanese Say About Women*, Kodansha International. Tokyo and New York

Haryono, E. dan Saptopo B. Ilkodar. (2005). *Menu-lis Skripsi Panduan Untuk Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Henshall, G. K. (2004). “A History of Japan; from Stone Age to Super Power, 2nd Edition. New York: Palgrave macmillan.

Jolivet, M. (2004). *Japan: The Childless Society; The Nostalgia for Yesterday Mother*. London: Routledge.

Jorgensen, M. & Louise. J Phillips. (2002). “Dis-course Analysis as Theory and Method”. London: Sage Publication.

Sasagawa, A. (2004). *Japan’s Changing Generation; Centered Selves and Life Choices*. New York: Routledge Curzon.

Soekanto, S. (2002). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koyu, S. (2006). *The Cambridge History of Japan Volume I: Early Buddha Worship*, Cambridge University Press.

Jurnal

International Journal of Japanese Society and Culture. (2008). ‘Jepang dan Beberapa Isu Internasional di Kawasan Asia Pasifik’, Vol.1 No.1

Muhayarah, I. (2015) “Fenomena Ikumen sebagai salah satu perubahan peran dan identitas ayah dalam masyarakat Jepang modern (The Ikumen Phenomenon as One of the Changes of Father’s Role and Identity within Japanese Modern Society)”, *Prosiding ASJI*.

Situs Internet

Basic Plan of Gender Equality. dilihat 8 agustus 2016 http://www.gender.go.jp/english_contents/pr_act/pub/pamphlet/women-and-men15/pdf/2-3.pdf

By the Light of My Father’s Smile–, *Fathering Japan Kansai*. Dilihat 30 Juni 2018. https://greenz.jp/2014/09/10/fathering_japan/

Jiji. Japan drops by three to 114th in gender equality rankings by World Economic Forum. Dilihat 30 Juni 2018. <https://www.japantimes.co.jp/news/2017/11/02/national/social-issues/japan-drops-114th-gender-equality-rankings-world-economic-forum/#.WzhcYdIzbMw>

- Kincaid. C. dilihat 5 Juni 2016 <http://www.japan-powered.com/japan-culture/a-look-at-gender-expectations-in-japanese-society>
- Koyama. T. “The Changing Social Position of Women in Japan, UNESCO, 1961. Dilihat 30 Juni 2018. <http://unesdoc.unesco.org/images/0000/000028/002807eo.pdf>
- Maruko. M. NPO Fathering Japan shows men how to be better dads. Dilihat 30 Januari 2018 https://www.japantimes.co.jp/news/2014/06/01/national/npo-fathering-japan-shows-men-better-dads/#.WnAgorxl_IU
- Maruko. M. NPO Fathering Japan shows men how to be better dads. Dilihat 21 April 2015 <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/06/01/national/npo-fathering-japan-shows-men-better-dads/#.WzhoFdIzbMw>
- OECD. Dilihat 16 Juni 2018. <https://www.oecd.org/japan/Gender2017-JPN-en.pdf>”
- Yan. S. Training to be a ‘super dad’ in Japan. dilihat 30 Januari 2018. <http://money.cnn.com/2016/10/21/news/economy/japan-dads-fathers-parenting/index.html>,